

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosentase  
Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah ( UMKM )**

S K R I P S I



Disusun Oleh :

Nama : Deni Triana  
Nomor Mahasiwa : 08313080  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2012**

**Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Prosentase Penyerapan Tenaga  
Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )**

**S K R I P S I**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Deni Triana

Nomor Mahasiswa : 08313080

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2012**

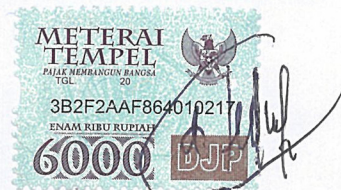
## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Deni Triana, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : '*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor UMKM*'. Adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin,tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, Januari 2012

Yang membuat Pernyataan



( Deni Triana )  
NIM : 08313080

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deni Triana  
NIM : 08313080  
Fakultas/jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi  
Judul skripsi : **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  
Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada  
Sektor UMKM**

Dosen Pembimbing : Akhsyim Afandi, Drs.,M.A.,Ph.D

Yogyakarta, Januari 2012

Dosen Pembimbing

الإمامة الإسلامية الأندلسية

Akhsyim Afandi, Drs.,M.A.,Ph.D

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

**Disusun Oleh: DENI TRIANA**  
**Nomor Mahasiswa: 08313080**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 13 Februari 2012


Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Akhsyim Afandi, MA, Ph.D  
Penguji I : Drs. Suharto, M.Si  
Penguji II : Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc



البعثة الإسلامية الأندلسية



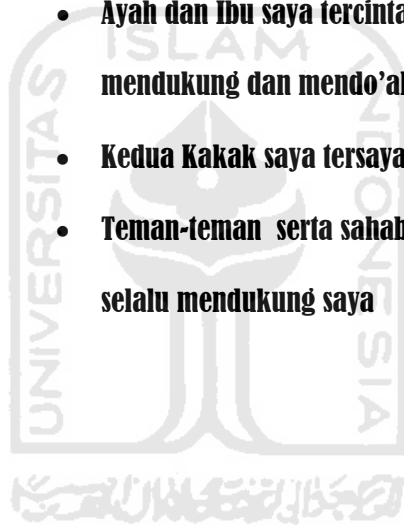
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

  
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya dedikasikan :**

- **Ayah dan Ibu saya tercinta yang selalu mendukung dan mendo'akan saya**
- **Kedua Kakak saya tersayang**
- **Teman-teman serta sahabat saya tersayang yang selalu mendukung saya**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis diperkenankan dan diberi kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala berkah dan nikmatnya sehingga penyusun mampu menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya
2. Prof. Edy Suandi Hamid.M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Suharto, SE, MS, selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Akhsyim Afandi, Drs.,M.A.,Ph.D selaku dosen pembimbing atas arahan, bimbingan dan saran serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi
6. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia
7. Segenap staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kedua Orangtuaku Bapak Suroto dan Ibu Sri Mubarakah, serta Kedua Saudara Kandungku Anton Wibowo dan Budi Cahyono, atas kasih sayang yang tulus, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar serta doa yang tiada henti dipanjatkan untukku
9. Teman – teman Kos Pink Maswan ( Ana, Dini, Silvy dan Widya) yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini
10. Teman-teman kuliah satu angkatan Ilmu Ekonomi 08, serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan berbagi semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap



semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	7

1.4 Manfaat penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8

## BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka .....	9
2.2 Landasan Teori .....	18
2.2.1 UMKM .....	18
2.2.2 PDRB Perkapita .....	22
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia .....	26
2.2.4 Prosentase Penduduk Miskin .....	29
2.2.5 Pendapatan Asli Daerah .....	32
2.2.6 Pengaruh masing-masing variabel terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM .....	37
2.3 Hipotesis Penelitian .....	44

## BAB 111 METODE PENELITIAN

3.1 Variabel penelitian dan definisi operasional .....	45
3.2 Jenis dan cara pengumpulan data .....	46
3.3 Metode analisis penelitian .....	47
3.3.1 Model regresi linier berganda .....	49
3.3.2 Pengujian penyimpangan asumsi klasik .....	50
3.3.3 Uji statistik .....	53

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Analisis Deskriptif .....	56
4.1.1 UMKM di Indonesia .....	56
4.1.2 Distribusi UMKM antar Provinsi .....	59
4.2 Hasil dan Analisis .....	60
4.2.1 Distribusi UMKM .....	60
4.2.2 Faktor-faktor penyerapan tenaga kerja di UMKM .....	61
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	62
4.2.4 Hasil Estimasi .....	65
4.2.5 Uji Statistik .....	67
4.3 Interpretasi Hasil .....	71

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran-saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA .....	75
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	79
-------------------------	----

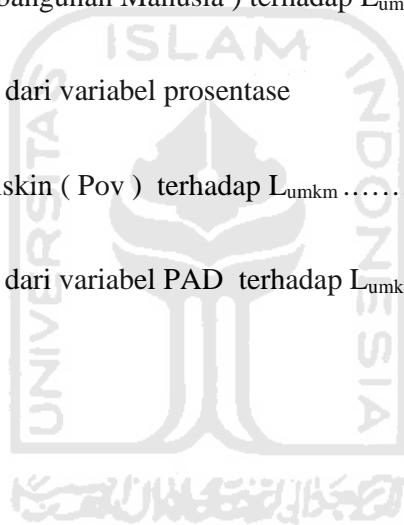
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Nasional Berdasarkan Skala Usaha ( Orang ).....	3
Tabel 1.2 Ringkasan Data PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Prosentase Penduduk Miskin, Pendapatan Asli Daerah serta Prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM Tahun 2009 perProvinsi .....	79
Tabel 1.3 Jenis dan cara pengumpulan data .....	47
Tabel 1.4 Cara Uji Autokorelasi .....	52
Tabel 1.5 Prosentase penyerapan tenaga kerja pada sector UMKM.....	59
Tabel 1.6 Hasil Uji Korelasi Matrix .....	62
Tabel 1.7 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (White (no cross term) .....	63
Tabel 1.8 Hasil Uji Autokorelasi ( Breusch-Godfrey ).....	64
Tabel 1.9 Ringkasan Hasil regresi linier berganda .....	66
Tabel 1.10 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap PDRB perkapita, IPM, Prosentase penduduk miskin dan PAD .....	80

Tabel 1.11 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ .....	80
Tabel 1.12 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel IPM .....	81
Tabel 1.13 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel Pov .....	81
Tabel 1.14 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel PAD .....	82
Tabel 1.15 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ dan IPM .....	82
Tabel 1.16 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ , IPM dan Pov .....	83
Tabel 1.17 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ dan Pov .....	83
Tabel 1.18 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ dan PAD .....	84
Tabel 1.19 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ , IPM dan PAD ....	84
Tabel 1.20 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel $Y_p$ , Pov dan PAD ....	85
Tabel 1.21 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel Pov dan PAD .....	85
Tabel 1.22 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel IPM dan Pov .....	86
Tabel 1.23 Hasil regresi variabel $L_{umkm}$ terhadap variabel IPM dan PAD .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kurva sceter dari variabel PDRB perkapita ( $Y_p$ ) terhadap $L_{umkm}$ .....	68
Gambar 1.2 Kurva sceter dari variabel IPM ( Indeks Pembangunan Manusia ) terhadap $L_{umkm}$ .....	69
Gambar 1.3 Kurva sceter dari variabel prosentase penduduk miskin ( $Pov$ ) terhadap $L_{umkm}$ .....	70
Gambar 1.4 Kurva sceter dari variabel PAD terhadap $L_{umkm}$ .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel Data Olahan ..... 87





## ABSTRAKSI

Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja dan kebijaksanaan mengenai penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Disamping itu perluasan penyerapan tenaga kerja juga tidak mengabaikan usaha-usaha lain yang mampu memberikan produktivitas yang lebih tinggi melalui berbagai program. Salah satu cara untuk memperluas penyerapan tenaga kerja adalah melalui pengembangan industry terutama industri yang bersifat padat karya. Perkembangan dapat terwujud melalui investasi swasta maupun pemerintah. Pengembangan industry tersebut akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Prosentase Penduduk Miskin, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data antar ruang (cross section) perProvinsi Tahun2009 dengan bantuan software Eviews 5.1.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), prosentase penduduk miskin tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Pendapatan asli Daerah tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan penting di dalam perekonomian Indonesia. Kemampuannya untuk tetap bertahan di masa krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor UMKM ini merupakan bagian dari sektor usaha yang cukup tangguh. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UMKM (Berry, dkk, 2001). Alasan *pertama* adalah karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga* adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Kuncoro (2002) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. UMKM memberikan prospek yang cerah di masa depan untuk menciptakan tenaga kerja dengan skala yang besar dan kesempatan mendapatkan pendapatan dengan biaya yang relatif rendah khususnya pada daerah desa atau pinggiran kota (rural) yang akan mendukung kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan berkeimbangan,

yang merupakan syarat untuk memicu dan keluar dari kemiskinan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya (Ahmed, 2000).

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Disisi lain Keberadaan UMKM ini juga memberikan peran penting terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha , serta berpengaruh juga terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Dimana ada sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam memajukan perekonomian indonesia terutama dalam hal pengurangan tingkat pengangguran. UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur (Berry, dkk, 2001). UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi disuatu daerah yang belum diolah secara komersial. Dengan begitu UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada disetiap daerah. Dimana Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Sektor Usaha Kecil dan Menengah telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis yang panjang. UMKM

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha besar. Dalam situasi dan kondisi ekonomi sekarang ini, pengembangan kegiatan UMKM dianggap sebagai salah satu alternatif yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah juga dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Jika jumlah pertumbuhan UMKM menjadi sangat besar, secara otomatis pasti akan mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

Tabel 1.1  
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Nasional  
Berdasarkan Skala Usaha ( Orang )

Skala Usaha	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Usaha Besar	4.459	4.550	4.557	4.838
Usaha Menengah	38.292	39.771	41.199	42.591
Usaha Kecil	499.569	522.124	546.675	579.501
Usaha Mikro	48.509.959	50.874.771	52.175.795	59.207.500
Jumlah	49.052.275	51.441.216	52.768.226	59.834.430

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (2010)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha berdasarkan skala usaha secara nasional tiap tahun terus mengalami perkembangan. Paling

mendominasi pelaku usaha di Indonesia yaitu pada skala mikro dimana pada tahun 2010 jumlah pelaku usaha naik sebesar 1,95% dan pada skala ini selalu menduduki jumlah pelaku usaha terbanyak, kemudian pada skala kecil pada tahun 2010 naik menjadi 4,92% meningkat dibanding skala mikro hal terjadi karena adanya perbaikan ekonomi di Indonesia. Sementara itu pada skala menengah naik menjadi 3,64% pada tahun 2010, dan pada skala besar juga naik sebesar 3,44%. Hal ini menunjukkan bahwa jika UMKM di Indonesia semakin meningkat tentu dapat mendonorkan penyerapan tenaga kerja serta memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Sukirno,1976). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut ( Yustika, 2007 ). Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, hendaknya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus

tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusianya ataupun Index Pembangunan Manusia yang terus ditingkatkan.UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UMKM. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar ( Achmad, 2009 ). Jika tidak, UMKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul tentang “ *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM* “ .

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM ), Prosentase penduduk miskin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM ), Prosentase penduduk miskin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM ), Prosentase penduduk miskin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM ), Prosentase penduduk miskin dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

### D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, menambah kelengkapan hasil penelitian mahasiswa dan dapat digunakan sebagai bacaan ilmiah untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti sendiri, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Prosentase Penduduk Miskin dan Penerimaan Asli Daerah terhadap Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah ).



3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi khususnya perkembangan UMKM

#### E. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan latar belakang penelitian yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab 11 : Landasan Teori yang akan digunakan untuk melandasi hipotesis yang diajukan memuat definisi UKM, PDRB perkapita, IPM, Prosentase penduduk miskin dan Pendapatan Asli Daerah

Bab 111 : Metode Penelitian yang meliputi jenis dan cara pengumpulan data, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan pengujian asumsi klasik.

Bab 1V : Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai hasil penelitian, yaitu data yang diperoleh akan di tulis dan di analisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

Bab V : Penutup yang memuat simpulan dan saran bagi pengembangan lebih lanjut hasil penelitian ini.

## **BAB 11**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### 2.1.1 Penelitian terdahulu

Untuk mendukung penulisan skripsi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris tersebut maka dibuatlah kerangka penelitian dan selanjutnya dibuatlah hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara yang perlu dibuktikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Oleh Andi R.R tentang '*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Skala Kecil-Menengah di Kota Makassar*'. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di UKM adalah: Upah, Produktivitas tenaga kerja, Kualitas SDM dan Naik turunnya permintaan pasar.

- a. Upah, apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Atau sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat

dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah .

- b. Produktivitas tenaga kerja juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di UKM yaitu dengan melihat nilai produksi. Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. dengan begitu produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.
- c. Kualitas SDM, keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha. Selain itu, dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, maka unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Jika kualitas SDM suatu daerah buruk, maka daerah tersebut sulit untuk berkembang. Dengan kualitas SDM yang rendah, maka kesempatan UMKM untuk menyerap tenaga kerja akan lebih besar, karena SDM yang rendah tidak dibutuhkan dalam perusahaan besar, sehingga dari sinilah peluang seseorang untuk bekerja di sektor UMKM lebih banyak dari pada di perusahaan besar. Perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diperkirakan lebih baik karena makin

terbukanya kesempatan berusaha serta adanya konsolidasi di kalangan UMKM dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan.

- d. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Oleh Heru Setiyadi tentang '*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Konveksi*'. Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pengembangan industri kecil adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.

Menurut BPS, industri kecil memiliki definisi yang sama dengan Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) yaitu merupakan usaha atau industri yang

menggunakan tenaga kerja antara 5 – 19 orang. Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh industri kecil ( Tambunan, 1997 ) adalah sebagai berikut :

- a. Sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata pertahun sangat tinggi, sehingga upah minimum tenaga kerja khususnya dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit
- b. Industri kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal tinggi.
- c. Industri kecil di Indonesia masih merupakan industri yang membuat produk-produk yang bernuansa kultural seperti kerajinan dari kayu dan rotan atau ukir-ukiran yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah.
- d. Kegiatan industri kecil masih sangat agricultural based karena mempunyai banyak komoditi-komoditi pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil.
- e. Pengusaha-pengusaha industri kecil lebih banyak menggantungkan diri pada kemampuan sendiri atau pinjam dari sumber informal untuk modal kerja dana industri.

- f. Dimana Kelemahan dari industri kecil itu sendiri yaitu dalam hal kemampuannya untuk bersaing masih lemah, tidak hanya di pasar domestik terhadap produk-produk dari industri besar dan menengah atau impor tetapi juga di pasar ekspor.

Oleh Oktaviana Dwi Saputri tentang ‘ *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Salatiga*’. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga Kerja atau Permintaan Tenaga Kerja diantaranya ;

- a. Perubahan Tingkat Upah, Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membelisama sekali (untuk barang sekunder dan tersier). Dalam jangka pendek kenaikan upah diantisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan bekurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Terjadinya Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunnya skala produksi

- b. Prosentase Penduduk Miskin, Prosentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk / persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dimana salah penyebab tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah itu disebabkan oleh masih banyaknya tingkat pengangguran daerah tersebut. Tingginya tingkat pengangguran terjadi karena sempitnya lapangan kerja atau menipisnya kesempatan untuk berusaha. Dimana lapangan kerja yang sempit dapat berdampak pada permintaan pada tenaga kerja. Semakin kecil kesempatan berusaha maka semakin sedikit tenaga kerja yang terserap, sehingga mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun dan angka kemiskinanpun meningkat
- c. Harga barang modal turun. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.
- d. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Oleh M. Agus Subekti tentang ‘ *Pengaruh Upah, Nilai Produksi, Nilai Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Genteng di*

*Kabupaten Banjarnegara*'. Industri kecil memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini yang paling dominan dalam memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja adalah nilai produksi. Nilai produksi adalah tingkat keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir pada suatu proses produksi suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual ketangan konsumen. Apabila permintaan hasil produksi suatu perusahaan meningkat maka kapasitas produksinya juga harus ditingkatkan. Dalam meningkatkan kapasitas produksi, cenderung perusahaan menambah jumlah tenaga kerja.

Oleh Maharani Tejasari tentang '*Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*'. Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sector ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan karena UKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah usaha UKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,18 % dari seluruh tenaga kerja di Indonesia ( BPS,2007 ). Posisi tersebut menunjukkan bahwa UKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian.

Oleh M.Taufikk Zamrowi tentang '*Analisis Penyerapan tenaga Kerja Pada Industri Kecil*'. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga



yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Dimana penyerapan tenaga kerja atau permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja diantaranya :

a. Perubahan Tingkat Upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit yang diproduksi . Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunnya pengaruh skala produksi yang disebut dengan efek skala produksi.

b. Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja,

1. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

2. PDRB Perkapita, PDRB perkapita merupakan jumlah penerimaan dari daerah sendiri, atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu . Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan terciptanya pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Hubungan antara PDRB perkapita atau jumlah output yang dihasilkan dengan penyerapan tenaga kerja adalah, apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung akan meningkatkan produksinya barangnya karena permintaan bertambah besar. Disamping itu permintaan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan penerimaan pendapatan yang asli dari daerah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan sejahtera dapat dilihat dari seberapa besar PAD yang diperoleh dari daerah tersebut. Jika PAD suatu daerah tinggi maka daerah tersebut sudah berkembang dengan baik yaitu dengan

melihat keadaan ekonomi dari daerah tersebut dan seberapa besar nilai output yang dihasilkan. Tingginya output yang dihasilkan disebabkan karena banyaknya usaha yang tersedia atau banyaknya peluang untuk membuka suatu usaha. Dengan demikian banyaknya kesempatan berusaha ini akan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja.

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Konsumen membeli barang yaitu karena memberi nikmat (utility) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi pengusaha memperkerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu disebut *derived demand* (Payaman Simanjuntak, 2001).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **2.2.1.1 Definisi UMKM**

Menurut UU No 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro menurut UU no 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri Usaha Mikro antara lain :

- a) Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, serta masih rendahnya tingkat SDM
- e) Tingkat pendidikan rata-rata rendah
- f) Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- g) Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

Menurut UU no 20 tahun 2008, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak.

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah Menurut UU no 20 tahun 2008 adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### 2.2.1.2 Peran Penting UMKM di Indonesia

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi sangat relevan dilakukan di Indonesia serta berperan penting terhadap perekonomian Indonesia ( Basri, 2002 ), Karena :

1. Struktur usaha di Indonesia ini sebenarnya bertumpu pada keberadaan industri kecil/ rumah tangga/ menengah, tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan baik dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang bisa diraih. Dengan memajukan kelas usaha tersebut secara otomatis membangun kesejahteraan masyarakat.

2. Tanpa disadari ternyata banyak industri kecil/ rumah tangga/ menengah, yang selama ini berorientasi ekspor sehingga sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa. Ini tentunya berkebalikan dengan industri besar yang justru mengeksploitasi pasar domestik untuk penjualannya.
3. Sektor industri kecil/ rumah tangga/ menengah telah terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian. Kenyataannya pada saat industri gulung tikar menghadapi krisis ekonomi, tapi justru industri kecil masih bertahan bahkan memperoleh keuntungan berlipat bagi yang berorientasi ekspor.
4. Industri kecil/ rumah tangga/ menengah lebih banyak memakai bahan baku atau bahan mentah dari dalam negeri sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini dipraktikkan oleh usaha besar/ industri besa

Beberapa keunggulan usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan usaha besar (Pangabean, 2004 ) antara lain :

- a) Inovasi dalam teknologi dapat dengan mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
- b) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam usaha kecil.
- c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja cukup tinggi.

- d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- e) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut, yang paling menonjol adalah adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja. UMKM memang mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja dari pada Unit Skala Besar. Hal ini disebabkan karena dalam pengambilan keputusan dan inovasi, Unit Skala Besar lebih sering terhambat oleh birokrasi dan kaku. Bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif, hal demikian kurang menarik dan terdapat kecenderungan mendirikan usaha sendiri.

Menurut Ariawati (2004), UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan tenaga kerja di tingkat lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai andil penting dalam penyusunan kebijakan tenaga kerja diberbagai wilayah. Agar kebijakan UMKM dan bisnis pemula berjalan dengan baik, otoritas pemerintah daerah harus melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan.

Menurut Abdul Rosid (2009), dengan berkembangnya UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja serta memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

## 2.2.2 PDRB Perkapita

### 2.2.2.1 Definisi PDRB Perkapita

Menurut Sadono Sukirno (1976) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan mendorong tingkat pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja berarti berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Sukirno, 1976). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Rendahnya pendapatan akan



berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya ( Kuncoro, 1997). Hubungan antara PDRB perkapita atau jumlah output yang dihasilkan dengan penyerapan tenaga kerja adalah, apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing- masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor- faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah

#### 2.2.2.2 Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut diantaranya ;

1. Cara Pengeluaran.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara Produksi atau cara produk netto.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan.

3. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi

yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. (Sukirno, 1976). Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

- a. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.
- b. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

### **2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

#### **2.2.3.1 Definisi IPM**

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*)

dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sector informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Menurut Rasidin & Bonar (2009), Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

### 2.2.3.2 Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.
- e. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini : Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot

akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang akibatnya banyak PHK dan menurutnya kesempatan kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997-1998. Menurut tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

#### **2.1.4 Prosentase Penduduk Miskin atau kemiskinan**

##### **2.1.4.1 Definisi Penduduk Miskin**

Penduduk miskin merupakan banyaknya / persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2009 (dalam satuan persen). Penduduk miskin merupakan penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan.

Hadinoto & Retnadi ( 2007) menyebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan

minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (povertyline) atau batas kemiskinan (povertytreshhold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan secara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut Tambunan ( 1997 ), Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingginya angka pengangguran menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Sempitnya lapangan usaha juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, karena kurangnya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.

Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan ( Harlem, 1995 ). Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya

peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

#### 2.1.4.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis dengan variasi yang berbeda, yaitu: kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, dan kemiskinan politik (Hadinoto & Retnadi, 2007). Dari kedua pendapat ini, maka kemiskinan memiliki 3 aspek, yaitu: ekonomis, politik dan sosial-psikologis.

##### a. Kemiskinan ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

##### b. Kemiskinan politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan



sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan resources. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu:

1. bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat,
2. bagaimana orang turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia,
3. bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

c. Kemiskinan sosial-psikologis

Secara sosial-psikologis, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas. Dimensi ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.

## **2.2.4 Pendapatan Asli daerah ( PAD )**

### **2.2.4.1 Definisi PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Tingginya PAD suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah berkembang dengan baik terutama dalam hal menciptakan nilai output. Besarnya nilai output yang dihasilkan disebabkan adanya kesempatan untuk berusaha. Sehingga dengan adanya kesempatan berusaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja semakin besar.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan

cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

#### 2.2.4.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang termaksud pendapatan asli daerah berasal dari ; Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah , Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 6 Undang-undang tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Suparmoko, 2002: 135). Mardiasmo (1997: 51) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Terdapat banyak batasan tentang pajak yang dikemukakan para ahli, tetapi pada dasarnya isinya hampir sama yaitu pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan jasa yang secara langsung dapat ditunjuk (Suparmoko, 2002). Dari batasan atau definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah Iuran masyarakat kepada Negara, berdasarkan undang-undang, Tanpa balas jasa secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Berdasarkan kewenangan memungutnya pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah adalah sama dengan pajak negara, perbedaannya terletak pada :

1. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak)
2. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (Suparmoko, 2002).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Suparmoko, 2002). Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal satu menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri dan atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi (Sutrisno, 2004). Dari definisi di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh daerah

2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah Lapangan retribusi daerah adalah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keperluan keuangan daerah sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh daerah.

c. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi (Kaho, 1988).

d. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan dinas-dinas merupakan penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, retribusi ataupun laba perusahaan daerah. Fungsi pokok dari penerimaan dinas-dinas daerah (kecuali dinas pendapatan daerah) pada umumnya adalah bukan mencari pendapatan daerah, tetapi melaksanakan sebagian urusan

pemerintah daerah yang bersifat pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat. Penerimaan lain-lain, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah ( Suparmoko,2002)

#### **2.2.6 Pengaruh dari masing-masing variabel terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM**

- a) Pengaruh PDRB Perkapita terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

Menurut Sadono Sukirno (1976), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

PDRB perkapita merupakan jumlah penerimaan dari daerah sendiri, atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor, dibagi dengan jumlah pertengahan tahun. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan terciptanya pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Sehingga pengaruh PDRB perkapita terhadap penyerapan

tenaga kerja di sektor UMKM adalah positif. Jika PDRB perkapita suatu daerah meningkat maka penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM juga meningkat. Dimana PDRB perkapita suatu daerah tinggi menunjukkan kemampuan daerah tersebut dalam mengembangkan daerahnya sudah berjalan dengan baik. Hubungan antara PDRB perkapita atau jumlah output yang dihasilkan dengan penyerapan tenaga kerja adalah, apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada ( Sukirno,1976 ).

b) Pengaruh IPM terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor  
UMKM

Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997).



Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) merupakan tingkat sumber daya manusia, dimana indek pembangunan manusia mencakup kemampuan manusia dalam menghasilkan output, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan manusia tersebut. Tingginya Kualitas Sumber Daya Manusia akan mendorong kesempatan kerja (Simanjutak, 1985). Dimana kualitas SDM suatu daerah itu berperan sangat penting guna keberhasilan daerah tersebut dalam hal membangun ekonomi daerah guna mensejahterakan kehidupan rakyat, serta mampu dalam menciptakan ide baru ataupun membuka peluang usaha . Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha. Selain itu, dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, maka unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Sehingga pengaruh IPM terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM adalah negatif. Karena semakin rendah kualitas SDM dalam suatu daerah maka semakin besar prosentase tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM, karena SDM yang rendah tidak dibutuhkan dalam perusahaan besar, dari situlah peluang orang untuk bekerja di sektor UMKM lebih banyak dari pada di perusahaan besar. Dan sebaliknya semakin tinggi kualitas SDM dalam suatu daerah, maka semakin sedikit prosentase tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM. Karena kualitas SDM yang tinggi atau bagus lebih dibutuhkan dalam perusahaan besar

atau sektor usaha besar dibanding mereka yang memiliki SDM buruk atau rendah. Misal untuk mereka yang mempunyai pendidikan atau kualitas SDM yang lebih baik, tidak heran jika mereka lebih memilih untuk bekerja pada perusahaan besar dengan harapan memperoleh nilai output yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi ( Rasidin & Bonar , 2009).

c) Pengaruh Prosentase penduduk miskin terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

Prosentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk / persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dimana salah penyebab tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah itu disebabkan oleh masih banyaknya tingkat pengangguran daerah tersebut. Banyaknya tingkat pengangguran itu disebabkan karena kecilnya peluang usaha ataupun lapangan usaha yang sempit. Suatu daerah dapat dikatakan miskin

dapat dilihat dari penghasilan yang mereka dapatkan atau masih banyaknya angka pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh masih tingginya angka pengangguran (Firdausi, 2010). Sehingga pengaruh prosentase penduduk miskin terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM adalah positif. Karena semakin besar tingkat kemiskinan suatu daerah maka penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM juga semakin meningkat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dikembangkan guna menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan (Hadinoto & Retnadi, 2007).

d) Pendapatan Asli Daerah terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan

cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. ( Bastian, 2001 )

Suatu daerah dapat dikatakan sejahtera dapat dilihat dari seberapa besar PAD yang diperoleh dari daerah tersebut. Jika PAD suatu daerah tinggi maka daerah tersebut sudah berkembang dengan baik yaitu dengan melihat keadaan ekonomi dari daerah tersebut dan seberapa besar nilai output yang dihasilkan. Tingginya output yang dihasilkan disebabkan karena banyaknya usaha yang tersedia atau banyaknya peluang untuk membuka suatu usaha. Peluang usaha yang tinggi dapat menarik seseorang untuk membuka suatu usaha guna penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini, sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga pengaruh PAD terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja di UMKM adalah positif. Jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi maka penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM akan meningkat. Dimana UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, dan didirikan dalam daerah itu sendiri. Jadi semakin besar jumlah usaha yang didirikan atau jumlah UMKM suatu daerah maka semakin besar PAD suatu daerah, dengan demikian kesempatan kerja akan meningkat, tingkat pengangguran berkurang, tingkat kemiskinan menurun dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu asumsi atau pernyataan mengenai sesuatu yang harus diuji kebenarannya ( Djarwanto dan Subagyo, 1993:183). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis, yaitu ;

1. PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM
2. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) berpengaruh negatif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM
3. Prosentase penduduk miskin, berpengaruh positif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM
4. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) berpengaruh positif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM

## BAB 111

### METODE PENELITIAN.

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variable-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (  $Y_p$  ) adalah jumlah penerimaan dari daerah sendiri, atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor. Data diambil dari masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2009. Dari Badan Pusat Statistik ( BPS ).
2. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) adalah tingkat atau kualitas dari sumberdaya manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2009. IPM juga merupakan indikator yang dapat mengukur tingkat kinerja dan merupakan urutan skala perbandingan kualitas pembangunan manusia dan penilaian beberapa komponen. Dimana data diambil dari BPS
3. Prosentase penduduk miskin ( Pov ) adalah banyaknya / persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2009 (dalam satuan persen). Penduduk miskin merupakan penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik

kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan.

Data diambil dari Badan Pusat Statistik ( BPS ).

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya daerah. Data diambil dari Badan Pusat Statistik ( BPS, 2009 ).

### **3.2 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Dimana Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*), dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, data tersebut dapat diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

Tabel 1.3

## Jenis dan Cara Pengumpulan Data

No	Variabel	Diskripsi Variabel	Jenis Data	Satuan	Sumber
1	Prosentase Penyeerapan Tenaga Kerja di UMKM	Banyaknya / prosentase tenaga kerja yang terserap pada sector UMKM	<i>cross section</i>	( % )	Badan Pusat Statistik ( BPS )
2	PDRB Perkapita ( Yp )	jumlah penerimaan dari daerah sendiri, untuk menciptakan output pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor.		Ribu Rupiah	
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dan urutan skala perbandingan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia		IPM	
4	Prosentase Penduduk Miskin	banyaknya / prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan		( % )	
5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana		Jutaan Rupiah	

### 3.3 Metode Analisis yang digunakan dalam Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi linier berganda, dengan menggunakan data *cross section* dan sebagai alat dalam



pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 5. Estimasi model regresi menggunakan Metode *Ordinary Least Squares*. Dalam OLS, terdapat sepuluh asumsi yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan asumsi klasik. Asumsi-asumsi ini meliputi: (Widarjono, 2009)

1. *Linear Regression Model*, yang berarti model harus linier dalam parameter.
2. Nilai X (variabel bebas) adalah tetap (*nonstochastic*).
3. Nilai rata-rata  $e_i$  (*error term*) adalah nol (0).
4. Homoskedastisitas, yaitu varians masing-masing  $e_i$  (*error term*) adalah sama (konstan) untuk setiap X.
5. Tidak ada autokorelasi antar  $e_i$  (*error term*).
6. Tidak ada *covarians* antara  $e_i$  (*error term*) dan X (variabel bebas).
7. Jumlah observasi (n) harus lebih besar dari pada jumlah parameter untuk diestimasi.
8. Variabilitas dalam nilai X (variabel bebas).
9. Model regresi tidak bias atau *error*.
10. Tidak terdapat multikolinearitas yang sempurna

Untuk mengetahui besarnya prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM ( $L_{umkm}$ ), maka menggunakan rumus penyerapan tenaga kerja (Mulyadi, 2003) sebagai berikut ;

$$L_{umkm} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja sektor UMKM}}{\text{Akatan Kerja}} \times 100 \%$$

Dengan Kriteria pengujian ; jika tenaga kerja yang terserap  $> 3,7\%$  , maka penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM tergolong tinggi. Jika tenaga kerja yang terserap  $< 3,7\%$  , maka penyerapan tenaga kerja di sector UMKM tergolong rendah. Untuk ukuran penyerapan tenaga kerja diformulasikan dengan sector ekonomi yang ada di Indonesia. Sector UMKM itu sendiri merupakan salah satu bagian dari Sembilan sector ekonomi, dimana sector UMKM dibagi menjadi 3 sektor yaitu; sector mikro, kecil dan menengah. Nilai  $3,7\%$  diperoleh dari  $100\% : 9 : 3 = 3,70$  atau  $3,7\%$

### 3.3.1 Model Regresi Linier Berganda

Model Umum

$$L_{umkm} = f( Yp, IPM, Pov, PAD ) \dots \dots \dots ( 1 )$$

Dimana :

$L_{umkm}$  = Prosentase Angkatan Kerja yang terserap di UMKM

$Yp$  = PDRB Perkapita

$IPM$  = Indeks pembangunan manusia

$POV$  = Prosentase Penduduk Miskin

$PAD$  = Pendapatan Asli Daerah

### Model Regresi Linier Berganda Data Populasi

$$L_{umkm} = \beta_0 + \beta_1 Y_{p1t} + \beta_2 IPM_{2t} + \beta_3 POV_{3t} + \beta_4 PAD_{4t} + \mu_t \dots \dots (2)$$

Dimana :

- $\beta_0$  adalah intersep
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  adalah koefisien regresi parsial
- $\beta_1$  = koefisien pengaruh PDRB perkapita ( $Y_p$ )
- $\beta_2$  = koefisien pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- $\beta_3$  = koefisien pengaruh Prosentase Penduduk Miskin (POV)
- $\beta_4$  = koefisien pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $\mu_i$  = Faktor Pengganggu

Karena data populasi tidak ada, maka model diatas ditaksir dengan menggunakan model Regresi Linier Berganda Data Sampel sebagai berikut ;

$$L_{umkm} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 YP_{1t} + \hat{\beta}_2 IPM_{2t} + \hat{\beta}_3 POV_{3t} + \hat{\beta}_4 PAD_{4t} + e_t \dots (3)$$

#### 3.3.2 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis hasil estimasi, terlebih dahulu dilakukan uji diagnosa model dengan melihat ada-tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Jika terjadi penyimpangan asumsi klasik, maka digunakan

pengujian statistik non parametrik, sebaliknya jika asumsi klasik terpenuhi maka digunakan pengujian statistik parametrik agar mendapatkan model regresi yang baik, dimana model regresi tersebut harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

### **1. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah hubungan linear antara variable independen di dalam regresi. Uji tersebut bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variable bebas.

### **2. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah variable gangguan yang mempunyai varian tidak konstan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section*. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White. Jika nilai chi-square hitung ( $n.R^2$ ) lebih besar dari nilai  $x^2$  kritis dengan derajat kepercayaan tertentu ( $\alpha$ ) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai  $x^2$  kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

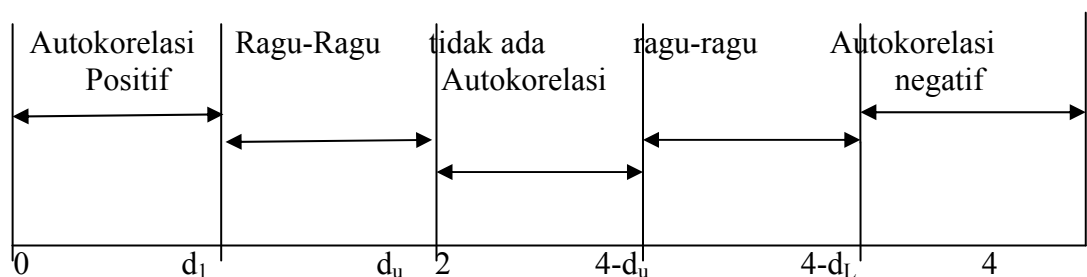
### 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar variable gangguan satu observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu. Autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*), jarang ditemukan pada data *cross section*. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan Uji Durbin-Watson. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan tabel berikut ;

Tabel 1.4

Cara Uji Autokorelasi

Nilai Statistik $d$	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; ada Autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Menerima hipotesis nol ; tidak ada Autokorelasi positif / negatif
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol ; ada Autokorelasi negatif



### 3.3.3 Uji Statistik

#### 1. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Dalam hal ini mengukur seberapa besar proporsi variasi variable dependen dijelaskan oleh semua variable independen, atau mengukur sejauh mana persentase model regresi mampu menerangkan variasi variable dependennya.

#### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2009: 69). Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_1$ : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan  $\alpha$  (0,05=5%), jika prob f-stat  $< \alpha$  maka menolak  $H_0$  maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat  $> \alpha$  maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji t statistik )

Untuk menguji pengaruh variable independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- a. Untuk variable PDRB Perkapita (  $Y_p$  )

$H_0 : \beta_1 \geq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel  $Y_p$  terhadap variabel  $L_{umkm}$

$H_1 : \beta_1 < 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel  $Y_p$  variabel  $L_{umkm}$

- b. Untuk variable Indeks pembangunan Manusia ( IPM )

$H_0 : \beta_2 \geq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel IPM terhadap variabel  $L_{umkm}$

$H_1 : \beta_2 < 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel IPM variabel  $L_{umkm}$

- c. Untuk variable Prosentase penduduk Miskin ( Pov )

$H_0 : \beta_3 \geq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel Pov terhadap variabel  $L_{umkm}$

$H_1 : \beta_3 < 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel Pov variabel  $L_{umkm}$

- d. Untuk Pendapatan Asli daerah ( PAD )

$H_0 : \beta_4 \geq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel PAD terhadap variabel  $L_{umkm}$

$H_1 : \beta_4 < 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel PAD variabel  $L_{umkm}$

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung  $>$  t kritis, maka  $H_0$  ditolak maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung  $<$  t kritis maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2009: 69).





## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **4.1 Analisis Diskriptif**

##### 4.1.1 UMKM di Indonesia

Dengan melihat kondisi ekonomi di Indonesia sekarang ini, pengembangan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai salah satu alternatif yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah, juga dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini sebagian besar tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.

Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan

kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia UKM ini memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu, UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

Tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UKM (Berry, dkk, 2001). Alasan *pertama* adalah karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga* adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Kuncoro (2000) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di

Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Badan Pusat Statistik ( BPS,2008 ) mencatat, jika dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UMKM meningkat 1,12% dari 96,13% pada tahun 2006 menjadi 97,3% pada tahun 2007. Tiga sektor UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian 42,5 juta pekerja, atau setara dengan 46,40% dari total tenaga kerja, sektor perdagangan dan perhotelan sebesar 25,18% dan sektor industri 11,35% dari total tenaga kerja. Dari data tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan sector UMKM berperan sangat penting, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, dimana yang menjadi variable dependennya yaitu prosentase angkatan kerja yang terserap didalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah . Sedangkan yang menjadi variable independen dalam setiap variabel dependen tersebut adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB ) perkapita, Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ), Prosentase Penduduk Miskin, dan Penerimaan Asli Daerah ( PAD ).

#### 4.1.2 Distribusi UMKM antar Provinsi

Tabel 1.5

Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM (  $L_{umkm}$  ) PerProvinsi 2009

No	Provinsi	Yp (Ribu Rp)	IPM (ipm)	Pov (%)	PAD (Juta Rp)	Jumlah AK UKM ( Ribu Rp)	AK (Juta Rp)	$L_{umkm}$ (%)
1	Naggroe Aceh Darussalam	7375,50	71,31	21,80	492248511	102391	1898000	5,40
2	Sumatera Utara	8420,60	73,8	11,51	968029297	159667	6298070	2,50
3	Sumatera Barat	7552,80	73,44	9,54	765669000	109976	2180966	5,04
4	Riau	17663,00	75,6	9,48	1017735596	25799	2260862	1,14
5	Jambi	5741,50	72,45	8,77	254778023	42080	1290854	3,26
6	Sumatera Selatan	8369,00	72,61	16,28	558667449	119406	3487999	3,42
7	Bengkulu	4608,60	72,55	18,59	147035950	20130	829000	2,42
8	Lampung	4826,60	70,93	20,22	287369751	178760	3740000	4,80
9	Bangka Belitung	8995,80	72,55	7,46	179946537	13017	556132	2,34
10	Kepulauan Riau	25290,60	74,54	8,27	604237366	21840	681769	3,20
11	DKI Jakarta	40268,80	77,36	3,62	-	139601	4690000	2,98
12	Jawa Barat	7292,00	71,64	11,96	2769454770	1004499	18890000	5,31
13	Jawa Tengah	5345,70	72,1	17,72	2316171546	1663882	16610167	10,01
14	DI Yogyakarta	5725,90	75,23	17,23	392301922	135391	2020000	6,70
15	Jawa Timur	8587,90	71,06	16,68	2954180027	1212882	20316770	5,97
16	Banten	7363,10	70,06	7,64	842955982	129251	4456720	2,90
17	Bali	7386,10	71,52	5,13	1114113667	177723	2123588	8,37
18	Nusa Tenggara Barat	4129,50	64,66	22,78	262629170	252115	1915234	13,16
19	Nusa Tenggara Timur	2578,30	66,6	23,31	306593585	143469	2340000	6,13
20	Kalimantan Barat	6714,70	68,79	9,30	256485857	72989	2200895	3,32
21	Kalimantan Tengah	8458,20	74,36	7,02	272208726	27879	1047402	2,70
22	Kalimantan Selatan	8271,70	69,3	5,12	412365066	99087	1821717	5,43
23	Kalimantan Timur	33333,50	75,11	7,73	874927658	31228	1460996	2,13
24	Sulawesi Utara	7465,20	75,68	9,79	180445972	58262	1077155	5,40
25	Sulawesi Tengah	6400,40	70,7	18,98	190064550	55762	1215727	4,60
26	Sulawesi Selatan	5982,70	70,94	12,31	821050438	171652	3536920	4,80
27	Sulawesi Tenggara	5083,60	69,52	18,93	274167567	106315	986096	10,80
28	Gorontalo	2754,90	69,79	25,01	136706657	40064	447313	8,90
29	Sulawesi Barat	3918,90	69,18	15,29	65570008	37140	515830	7,20
30	Maluku	2980,80	70,96	28,23	119025279	55897	589703	9,50
31	Maluku Utara	2882,30	68,63	10,36	220217964	12258	422400	2,90
32	Irian Jaya Barat	9098,70	68,58	35,71	125998765	5777	360660	1,60
33	Papua	10930,50	64,53	37,53	392982042	21071	76396	2,80

## 4.2 Hasil Dan Analisis

### 4.2.1 Distribusi UMKM

Pada Tabel 1.1 tersebut menunjukkan Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor UMKM perProvinsi. Dimana provinsi yang mempunyai prosentase penyerapan tenaga kerja paling tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 13,16 %. Sedangkan, provinsi yang prosentase penyerapan angkatan kerja paling rendah adalah Provinsi Riau hanya 1,14 %. Untuk kategori provinsi yang memiliki prosentase penyerapan tenaga kerjanya lebih dari 3,7 % ( tergolong tinggi ) disektor UMKM adalah Nanggro Aceh Darusalam sebesar 5,40 %, Sumatra Barat 5,04 %, Lampung 4,80 %, Jawa Barat 5,31 %, Jawa Tengah 10,01 %, D.I Yogyakarta 6,70 %, Jawa Timur 5,97%, Bali 8,37 %, Nusa Tenggara Timur 6,13 %, Kalimantan Selatan 5,43 %, Sulawesi Utara 5,40 %, Sulawesi Tengah 4,60 %, Sulawesi Selatan 4,80 %, Sulawesi Tenggara 10,80 %, Gorontalo 8,90 %, Sulawesi Barat 7,20 % dan Maluku 9,50 %. Sedangkan untuk kategori provinsi yang memiliki prosentase penyerapan tenaga kerjanya kurang dari 3,7 % ( tergolong rendah ) disektor UMKM adalah Sumatra Utara sebesar 2,50%, Jambi 3,26%, Sumatra Selatan 3,42%, Bengkulu 2,42%, Bangka Belitung 2,34%, Kepulauan Riau 3,20%, DKI Jakarta 2,98%, Banten 2,90%, Kalimantan Barat 3,32%, Kalimantan Timur 2,13%, Irian Jaya Barat1,60% , Maluku Utara 2,90%, dan Papua 2,80%

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa untuk prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Indonesia tergolong tinggi, walaupun ada

sebagian provinsi yang prosentase penyerapan tenaga kerja UMKM masih rendah. Dengan melihat tingginya prosentase tenaga kerja yang terserap di UMKM, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memang sangat berperan penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga tidak heran jika keberadaan UMKM ini dapat mengurangi tingkat pengangguran, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Jika jumlah UMKM di Indonesia ini terus dikembangkan maka tingkat pengangguran akan menurun, jumlah kemiskinan menurun, dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, serta membantu memperbaiki perekonomian Indonesia.

#### 4.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB ) perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Prosentase Penduduk Miskin dan Penerimaan Asli daerah (PAD).

Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB ) perkapita adalah jumlah penerimaan dari daerah sendiri, atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor, dibagi dengan jumlah pertengahan tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tingkatan sumberdaya manusia, dimana indeks pembangunan manusia mencakup kemampuan

manusia dalam menghasilkan output, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan manusia tersebut.

Prosentase Penduduk Miskin adalah banyaknya penduduk / persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

Penerimaan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinieritas

Dalam uji Multikolinieritas ini, jika ingin mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam suatu regresi data dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variable bebas.

Tabel 1.6

Hasil Uji Corelation Matrix

	LIPM	LPAD	LYP	POV
LIPM	1.000000	0.270425	0.476747	-0.568480
LPAD	0.270425	1.000000	0.435142	-0.329133
LYP	0.476747	0.435142	1.000000	-0.335118
POV	-0.568480	-0.329133	-0.335118	1.000000

Dari hasil uji di atas dapat diketahui bahwa tidak mengandung unsur multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda tersebut. Hal ini dikarenakan nilai korelasi matrik dari semua variable adalah kurang dari 0,8

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji White,

Tabel 1.7

#### Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (White (*no cross term*))

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	2.162929	Prob. F(8,23)	0.070718
Obs*R-squared	13.73853	Prob. Chi-Square(8)	0.088840

Test Equation:

Dependent Variable: RESID<sup>2</sup>

Method: Least Squares

Date: 12/14/11 Time: 11:15

Sample: 1 33

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23839.37	12254.55	1.945348	0.0641
LYP	-22.27699	45.99762	-0.484307	0.6327
LYP <sup>2</sup>	1.143614	2.509794	0.455660	0.6529
LIPM	-11102.39	5694.808	-1.949563	0.0635
LIPM <sup>2</sup>	1291.947	669.5947	1.929446	0.0661
POV	0.693192	0.769375	0.900980	0.3769
POV <sup>2</sup>	-0.023617	0.019639	-1.202540	0.2414
LPAD	12.13089	52.37821	0.231602	0.8189
LPAD <sup>2</sup>	-0.309651	1.303689	-0.237519	0.8144
R-squared	0.429329	Mean dependent var		5.411092
Adjusted R-squared	0.230835	S.D. dependent var		7.718370
S.E. of regression	6.769170	Akaike info criterion		6.894892
Sum squared resid	1053.898	Schwarz criterion		7.307131
Log likelihood	-101.3183	F-statistic		2.162929
Durbin-Watson stat	2.175687	Prob(F-statistic)		0.070718



Dari hasil uji diatas dapat dilihat nilai prob chi-square ( 0.088840 ) >  $\alpha$  ( 0,05=5% ), maka tidak mengandung heteroskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji Breusch-Godfrey.

Tabel 1.8

#### Hasil Uji Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.761503	Prob. F(2,25)	0.477492
Obs*R-squared	1.837507	Prob. Chi-Square(2)	0.399016

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/14/11 Time: 11:19

Sample: 1 33

Included observations: 32

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.151402	62.49787	0.146427	0.8848
LYP	0.229227	1.118856	0.204876	0.8393
LIPM	-2.558709	14.89387	-0.171796	0.8650
POV	-0.010047	0.069989	-0.143549	0.8870
LPAD	-0.003726	0.556487	-0.006695	0.9947
RESID(-1)	0.244328	0.222837	1.096445	0.2833
RESID(-2)	-0.185483	0.217890	-0.851268	0.4027

R-squared	0.057422	Mean dependent var	4.08E-15
Adjusted R-squared	-0.168797	S.D. dependent var	2.363397
S.E. of regression	2.555089	Akaike info criterion	4.904691
Sum squared resid	163.2120	Schwarz criterion	5.225321
Log likelihood	-71.47506	F-statistic	0.253834
Durbin-Watson stat	2.042280	Prob(F-statistic)	0.953066

Dapat dilihat dari nilai prob-chisquare ( 0.399016 ) >  $\alpha$  ( 0,05=5% ), maka tidak mengandung autokorelasi

#### 4.2.4 Hasil Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi Model Regresi Linier Berganda secara keseluruhan disajikan dalam tabel 1.9. Tabel tersebut memuat variasi 14 model regresi linier berganda. Regresi 1-4 merupakan model regresi dimana prosentase penyerapan tenaga kerja di UMKM diregres terhadap masing-masing variabel bebas secara terpisah. Setelah dilakukan berbagai variasi regresi sebanyak 14 model, hanya variabel PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Jika dilihat dari nilai Adjusted R-squared, F-statistic dan t-Statistic hasil regresi berganda variabel PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM memiliki nilai yang lebih signifikan dibandingkan dengan nilai Prosentase penduduk miskin dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan melihat nilai Adjusted R-squared ( $\bar{R}^2$ )

Nilai  $\bar{R}^2$  Variabel PDRB Perkapita (  $Y_p$  ) sebesar 0.255195

Niai  $\bar{R}^2$  variabel Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) sebesar 0.103513

Nilai  $\bar{R}^2$  penduduk miskin (POV ) sebesar 0.042669

Nilai ( $\bar{R}^2$ ) PAD sebesar -0.031721,

Dari keempat model tersebut terlihat nilai  $\bar{R}^2$  paling besar dimiliki oleh variabel PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita dan IPM mempunyai pengaruh yang besar terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Dimana Kriteria suatu model dikatakan baik jika memiliki nilai Adjusted R-squared ( $\bar{R}^2$ ), F-statistic dan t-Statistic yang signifikan.

Tabel 1.9  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

	REG 1	REG 2	REG 3	REG 4	REG 5	REG 6	REG 7
C	26.42146 (4.268463)	111.0049 (2.270241)	3.656854 (3.546186)	7.576454 (0.669801)	40.64103 (0.663403)	53.21702 (1.053742)	48.02273 (0.784178)
Yp	-2.404853 (-3.458944)				-2.999810 (-3.075906)	-2.152336 (-2.540425)	-2.138648 (-2.470034)
IPM		-24.82566 (-2.166767)			-6.109060 (-0.417462)	-6.804680 (-0.534702)	-5.653584 (-0.379352)
Pov			0.093038 (1.557652)		0.032666 (0.479262)		0.010613 (0.155627)
PAD				-0.123430 (-0.216543)	0.833166 (1.513503)		
N	33	33	33	33	33	33	33
$\bar{R}^2$	0.278471	0.131528	0.072586	0.001561	0.352957	0.285282	0.285878
$\bar{R}^2$	0.255195	0.103513	0.042669	-0.031721	0.257099	0.237634	0.212004

	REG 8	REG 9	REG 10	REG 11	REG 12	REG 13	REG 14
C	24.95972 (3.441221)	19.49961 (1.968737)	56.89000 (1.130620)	15.50771 (1.389662)	0.775814 (0.063685)	96.47599 (1.537433)	111.7338 (2.076582)
Y <sub>p</sub>	-2.280212 (-2.961074)	-3.306213 (-3.805170)	-3.004181 (-3.123791)	-3.145019 (-3.503862)			
IPM			-9.541253 (-0.758145)			-21.51931 (-1.479351)	-25.82644 (-1.975992)
Pov	0.023452 (0.401905)			0.046590 (0.795649)	0.092900 (1.381868)	0.027724 (0.377794)	
PAD		0.747300 (1.421073)	0.779358 (1.466466)	0.840493 (1.550624)	0.147044 (0.247262)		0.178656 (0.316023)
N	33	33	33	33	33	33	33
R <sup>2</sup>	0.282335	0.334057	0.347453	0.348781	0.063243	0.135640	0.120038
R <sup>2</sup>	0.234490	0.288130	0.277537	0.279007	-0.001361	0.078016	0.059351

#### 4.2.5 Uji statistik

a. Uji Determinasi ( R<sup>2</sup> )

Dari hasil regresi ( tabel 1.10 ) dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup>=0.352957, berarti secara keseluruhan variable independennya dapat menerangkan variable Y sebesar 0.352957 (35%) sedangkan sisanya (65%) dipengaruhi variable lain.

b. Uji F

Dari hasil regresi ( tabel 1.10 ) dapat dilihat bahwa nilai prob f-stat = 0.016158, dengan asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena prob f-stat <  $\alpha$  maka secara serentak variable independent mempengaruhi variable dependent.

c. Uji t

Dalam uji t adalah uji secara individual bagaimana variable independen mempengaruhi variabel dependen.

$$L_{umkm} = \beta_0 + \beta_1 Yp_{1t} + \beta_2 IPM_{2t} + \beta_3 POV_{3t} + \beta_4 PAD_{4t} + \epsilon_t$$

Untuk  $L_{ukm}$

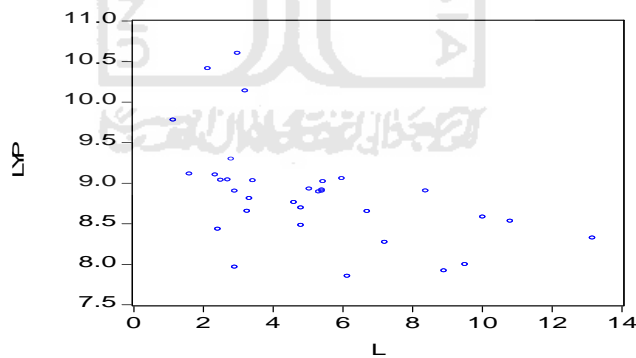
**a. PDRB Perkapita ( Yp )**

$$H_0 = \beta_1 \geq 0$$

$$H_1 = \beta_1 < 0$$

Dari hasil regresi ( tabel 1.11 ) dapat dilihat bahwa nilai  $\rho$ -value = 0.0016 ,asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value  $< \alpha$  maka menolak  $H_0$ , sehingga Yp berpengaruh secara signifikan terhadap  $L_{ukm}$ . Dapat dilihat dari kurva sceter dibawah, membentuk sebuah pola yang menunjukkan bahwa variable Yp dengan  $L_{umkm}$  mempunyai hubungan.

Gambar 1.1



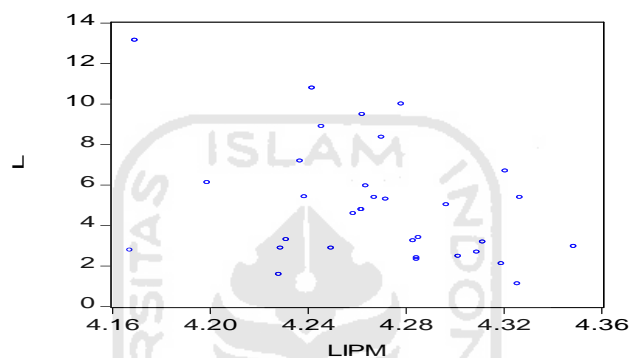
**b. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )**

$$H_0 = \beta_2 \geq 0$$

$$H_1 = \beta_2 < 0$$

Dari hasil regresi ( tabel 1.12 ) dapat dilihat bahwa nilai  $\rho$ -value = 0.0381, asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value  $< \alpha$  maka menolak  $H_0$ , sehingga IPM berpengaruh secara signifikan terhadap  $L_{ukm}$ . Dapat dilihat dari kurva sceter dibawah, membentuk sebuah pola yang menunjukkan bahwa IPM dengan  $L_{umkm}$  mempunyai hubungan.

Gambar 1.2



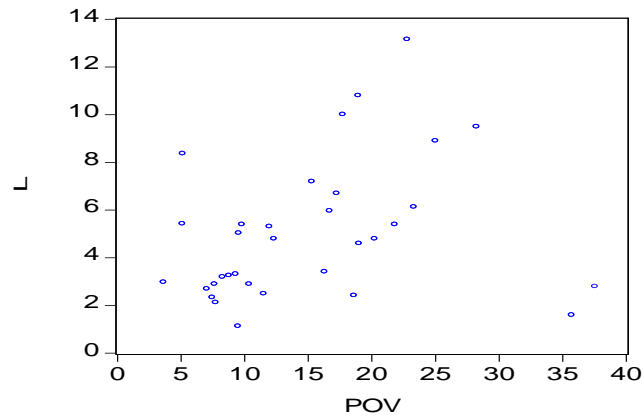
**c. Prosentase Penduduk Miskin ( Pov )**

$$H_0 = \beta_3 \geq 0$$

$$H_1 = \beta_3 < 0$$

Dari hasil regresi ( tabel 1.13 ) dapat dilihat bahwa nilai  $\rho$ -value = 0.1295, asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value  $> \alpha$  maka menerima  $H_0$ , sehingga Pov tidak berpengaruh signifikan terhadap  $L_{umkm}$ .

Gambar 1.3



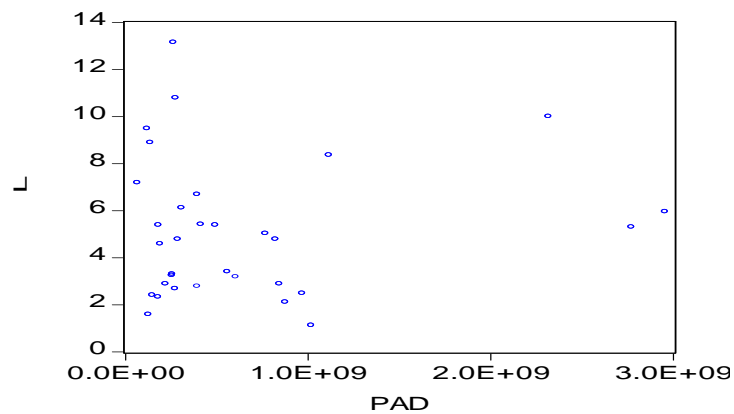
**d. Penerimaan Asli Daerah ( PAD )**

$$H_0 = \beta_4 \geq 0$$

$$H_1 = \beta_4 < 0$$

Dari hasil regresi ( tabel 1.14 ) dapat dilihat bahwa nilai  $\rho$ -value = 0.8300, asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value  $> \alpha$  maka menerima  $H_0$ , sehingga PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap  $L_{umkm}$ .

Gambar 1.4



### 4.3 Interpretasi Hasil Estimasi Masing-masing Koefisien

Dari hasil regresi prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM ( $L_{umkm}$ ) terhadap variabel PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Prosentase Penduduk Miskin (Pov), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel PDRB perkapita dan IPM mempunyai pengaruh signifikan secara negatif terhadap  $L_{umkm}$  dengan nilai koefisien sebesar -2.404853 dan -24.82566. Sedangkan Variabel Pov tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap  $L_{umkm}$  dengan nilai koefisien 0.093038, dan PAD tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap  $L_{umkm}$  dengan nilai koefisien -0.123430.

Variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan secara negatif sebesar -2.404853 terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM ( $L_{umkm}$ ), hal ini menunjukkan ada pengaruh negatif antara PDRB perkapita terhadap  $L_{umkm}$ . Artinya, jika PDRB perkapita suatu daerah meningkat sebesar 1 % maka akan menurunkan prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 2.404853 %. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh signifikan secara negatif sebesar -24.82566 terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada UKM ( $L_{umkm}$ ), hal ini menunjukkan ada pengaruh negatif antara IPM terhadap  $L_{umkm}$ . Artinya, jika IPM suatu daerah meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 24.82566.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Variable PDRB Perkapita (  $Y_p$  ) berpengaruh signifikan negatif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $\rho$ -value = 0.0016 ,dengan asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value <  $\alpha$  maka menolak  $H_0$ , sehingga PDRB Perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap  $L_{umkm}$ . Variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan secara negatif terhadap  $L_{umkm}$ , artinya PDRB perkapita mempunyai pengaruh negatif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Dimana, jika PDRB perkapita suatu daerah tinggi maka prosentase penyerapan tenaga kerja pada sector UMKM akan rendah, dan sebaliknya jika PDRB perkapita suatu daerah rendah maka prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM akan tinggi.
2. Variabel Indeks pembangunan Manusia ( IPM ) berpengaruh signifikan negatif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sector UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $\rho$ -value = 0.0381, dengan asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value <  $\alpha$  maka menolak  $H_0$ , sehingga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap  $L_{umkm}$ . Variabel IPM berpengaruh signifikan secara negatif terhadap  $L_{umkm}$ , artinya IPM

mempunyai pengaruh negatif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Dimana, jika IPM suatu daerah rendah maka prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM akan tinggi, dan sebaliknya jika IPM suatu daerah tinggi maka prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM akan rendah

3. Variabel Prosentase Penduduk Miskin ( Pov ) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sector UKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $\rho$ -value = 0.1295, dengan asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value  $> \alpha$  maka menerima  $H_0$ , sehingga Pov tidak berpengaruh signifikan terhadap  $L_{umkm}$ . Dimana, jika prosentase penduduk miskin suatu daerah tinggi maka prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM juga semakin besar.
4. Variable Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $\rho$ -value = 0.8300, asumsi  $\alpha = 0,05$ , karena  $\rho$ -value  $> \alpha$  maka menerima  $H_0$ , sehingga PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap  $L_{umkm}$ . Dimana, jika PAD suatu daerah tinggi maka prosentase penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM rendah.

5. Variable PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Prosentase penduduk miskin, dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap prosentase penyerapan tenaga kerja pada sector UMKM. Pengaruh dari keempat variabel tersebut cukup besar yang ditunjukkan oleh koefisien Determinasi (  $R^2$  ) sebesar 0,352. Dengan demikian prosentase penyerapan tenaga kerja pada sector UMKM sebesar 35,2 % dijelaskan oleh variabel PDRB perkapita, IPM, prosentase penduduk miskin dan PAD. Sedangkan sisanya 64,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## 5.2 Saran-saran

Dari analisis yang diperoleh peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan unit usaha yang ada atau juga dapat mengembangkan usaha yang telah ada, hal ini sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, misal dalam meminjamkan modal guna membuka suatu usaha agar masyarakat dapat dengan mudah mengembangkan usahanya sehingga memperoleh output yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariawati, Ria Ratna. 2004. Usaha Kecil dan Kesempatan Kerja. Fakultas Ekonomi, UNIKOM : Jakarta
- Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia. Erlangga : Jakarta
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba4 : Jakarta
- Berry, Sandee and Rodriguez. 2001. Small and Medium Enterprise Dynamics In Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.37, No.3, 2001.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Perkembangan Indikator Makro ; *Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Badan Pusat Statistik : Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2010. Data PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Prosentase Penduduk Miskin, dan Pendapatan Asli Daerah 2009. Badan Pusat Statistik : Jakarta
- Djuaini, Achmad. 2009. “Strategi Bisnis Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”. (Skripsi). Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional : Surabaya
- Djarwanto & Subagyo. 1993. Study Kelayakan. PT Elex Media Komputindo : Jakarta
- Firdausi, Nur Tsaniyah. 2010. Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang

- Hadinoto, Soetanto & Djoko Retnadi. 2007. *Micro Credit Challenge ; Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta
- Harlem, Siahaan. 1995. *Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi*. Prisma, Hal. 17 - 31, No. 1.
- Irawan, Ahmed. 2000. *Labour Market Dynamics Orh-donesia: A-ralysis of 18 Key Indicators of The Labour Market*. Intemational Labour Office : Jakarta
- Iwantono, Sutrisno. 2004. *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah* : Jakarta.
- Josef, Riwu Kaho. 1988. *Prospek Otonmi Daerah di Negara RI* : Rajawali Pers
- Jurnal Koperasi & UMKM, Tabloid kerjasama Bisnis Indonesia dengan kementrian Negara Koperasi dan UMKM, edisi VI/ Oktober 2008.
- Kuncoro, Haryo, 2002. *Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja*. Media Ekonomi, Volume 7, Nomor 2 hal 165-168.
- Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Pertama*. AMPYKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. AMPYKPN : Yogyakarta.
- Mulyadi Firdaus, Carunia. 2003. *Prospek Bisnis UKM Dalam Era Perdagangan Bebas Dan Otonomi Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi* : Jakarta

- Pangabean, Riana. 2004. *Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM* : Jakarta.
- Payaman J.Simanjuntak. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pendapatan Daerah*. BPFE UI: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2002 *tentang Restribusi Daerah*
- Rasidin S, & Bonar S. 2009. Dampak Infestasi Sumber Daya Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia, Prisma, Hal.17-31, No.1
- Rosid, Abdul. 2009. *Manajemen Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB
- Sukirno, Sadono. (1976). *Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit FE UI: Jakarta
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik; Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, ANDI : Yogyakarta
- Tulus Tambunan. 1997. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, PT Mutiara Sumber Widya , Jakarta
- Undang-Undang No 20 tahun 2008 *tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Definisi dan Kriteria UMKM*.
- Undang-Undang No 36 tahun 2004 *tentang Pendapatan Asli Daerah ; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Penerimaan dari Dinas*.

Undang-Undang No 34 tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika; pengantar dan aplikasinya*. Ekonisia.  
Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta

Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia Satu Dekade Pascakrisis  
Ekonomi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya : Malang



**LAMPIRAN :**

**Tabel 1.2**

**Data PDRB Perkapita ( Yp ), Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ),  
Prosentase Penduduk Miskin ( POV ), Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) serta  
Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor UKM ( L<sub>ukm</sub> ) Tahun 2009  
PerProvinsi**

No	Provinsi	Yp (Ribuan RP)	IPM (ipm)	POV (%)	PAD (jutaan Rp)	L <sub>ukm</sub> (%)
1	Naggroe Aceh Darussalam	7375,50	71,31	21,80	492248511	5,40
2	Sumatera Utara	8420,60	73,8	11,51	968029297	2,50
3	Sumatera Barat	7552,80	73,44	9,54	765669000	5,04
4	Riau	17663,00	75,6	9,48	1017735596	1,14
5	Jambi	5741,50	72,45	8,77	254778023	3,26
6	Sumatera Selatan	8369,00	72,61	16,28	558667449	3,42
7	Bengkulu	4608,60	72,55	18,59	147035950	2,42
8	Lampung	4826,60	70,93	20,22	287369751	4,80
9	Bangka Belitung	8995,80	72,55	7,46	179946537	2,34
10	Kepulauan Riau	25290,60	74,54	8,27	604237366	3,20
11	DKI Jakarta	40268,80	77,36	3,62	-	2,98
12	Jawa Barat	7292,00	71,64	11,96	2769454770	5,31
13	Jawa Tengah	5345,70	72,1	17,72	2316171546	10,01
14	DI Yogyakarta	5725,90	75,23	17,23	392301922	6,70
15	Jawa Timur	8587,90	71,06	16,68	2954180027	5,97
16	Banten	7363,10	70,06	7,64	842955982	2,90
17	Bali	7386,10	71,52	5,13	1114113667	8,37
18	Nusa Tenggara Barat	4129,50	64,66	22,78	262629170	13,16
19	Nusa Tenggara Timur	2578,30	66,6	23,31	306593585	6,13
20	Kalimantan Barat	6714,70	68,79	9,30	256485857	3,32
21	Kalimantan Tengah	8458,20	74,36	7,02	272208726	2,70
22	Kalimantan Selatan	8271,70	69,3	5,12	412365066	5,43
23	Kalimantan Timur	33333,50	75,11	7,73	874927658	2,13
24	Sulawesi Utara	7465,20	75,68	9,79	180445972	5,40
25	Sulawesi Tengah	6400,40	70,7	18,98	190064550	4,60
26	Sulawesi Selatan	5982,70	70,94	12,31	821050438	4,80
27	Sulawesi Tenggara	5083,60	69,52	18,93	274167567	10,80
28	Gorontalo	2754,90	69,79	25,01	136706657	8,90
29	Sulawesi Barat	3918,90	69,18	15,29	65570008	7,20
30	Maluku	2980,80	70,96	28,23	119025279	9,50
31	Maluku Utara	2882,30	68,63	10,36	220217964	2,90
32	Irian Jaya Barat	9098,70	68,58	35,71	125998765	1,60
33	Papua	10930,50	64,53	37,53	392982042	2,80
	<b>INDONESIA</b>	<b>9409,10</b>	<b>71,76</b>	<b>14,15</b>	<b>20576334698</b>	<b>189,40</b>



**Tabel 1.10**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:39  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.64103	61.26148	0.663403	0.5127
LYP	-2.999810	0.975261	-3.075906	0.0048
LIPM	-6.109060	14.63382	-0.417462	0.6796
POV	0.032666	0.068158	0.479262	0.6356
LPAD	0.833166	0.550489	1.513503	0.1418

R-squared	0.352957	Mean dependent var	5.129688
Adjusted R-squared	0.257099	S.D. dependent var	2.938124
S.E. of regression	2.532419	Akaike info criterion	4.838828
Sum squared resid	173.1550	Schwarz criterion	5.067849
Log likelihood	-72.42125	F-statistic	3.682073
Durbin-Watson stat	1.626963	Prob(F-statistic)	0.016158

**Tabel 1.11**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:34  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.42146	6.189925	4.268463	0.0002
LYP	-2.404853	0.695256	-3.458944	0.0016

R-squared	0.278471	Mean dependent var	5.064545
Adjusted R-squared	0.255195	S.D. dependent var	2.915963
S.E. of regression	2.516536	Akaike info criterion	4.742335
Sum squared resid	196.3215	Schwarz criterion	4.833033
Log likelihood	-76.24853	F-statistic	11.96429
Durbin-Watson stat	1.503608	Prob(F-statistic)	0.001599

**Tabel 1.12**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:36  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.0049	48.89562	2.270241	0.0303
LIPM	-24.82566	11.45746	-2.166767	0.0381
R-squared	0.131528	Mean dependent var		5.064545
Adjusted R-squared	0.103513	S.D. dependent var		2.915963
S.E. of regression	2.760921	Akaike info criterion		4.927697
Sum squared resid	236.3032	Schwarz criterion		5.018395
Log likelihood	-79.30701	F-statistic		4.694881
Durbin-Watson stat	1.216178	Prob(F-statistic)		0.038056

**Tabel 1.13**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:20  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.656854	1.031208	3.546186	0.0013
POV	0.093038	0.059730	1.557652	0.1295
R-squared	0.072586	Mean dependent var		5.064545
Adjusted R-squared	0.042669	S.D. dependent var		2.915963
S.E. of regression	2.853073	Akaike info criterion		4.993362
Sum squared resid	252.3408	Schwarz criterion		5.084060
Log likelihood	-80.39048	F-statistic		2.426280
Durbin-Watson stat	1.111978	Prob(F-statistic)		0.129467

**Tabel 1.14**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:38  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.576454	11.31150	0.669801	0.5081
LPAD	-0.123430	0.570002	-0.216543	0.8300
R-squared	0.001561	Mean dependent var		5.129688
Adjusted R-squared	-0.031721	S.D. dependent var		2.938124
S.E. of regression	2.984360	Akaike info criterion		5.085109
Sum squared resid	267.1921	Schwarz criterion		5.176717
Log likelihood	-79.36174	F-statistic		0.046891
Durbin-Watson stat	1.250056	Prob(F-statistic)		0.830030

**Tabel 1.15**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:41  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.21702	50.50290	1.053742	0.3004
LYP	-2.152336	0.847235	-2.540425	0.0165
LIPM	-6.804680	12.72613	-0.534702	0.5968
R-squared	0.285282	Mean dependent var		5.064545
Adjusted R-squared	0.237634	S.D. dependent var		2.915963
S.E. of regression	2.546031	Akaike info criterion		4.793456
Sum squared resid	194.4682	Schwarz criterion		4.929502
Log likelihood	-76.09203	F-statistic		5.987299
Durbin-Watson stat	1.461729	Prob(F-statistic)		0.006487

**Tabel 1.16**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:44  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.02273	61.23955	0.784178	0.4393
LYP	-2.138648	0.865837	-2.470034	0.0196
LIPM	-5.653584	14.90327	-0.379352	0.7072
POV	0.010613	0.068195	0.155627	0.8774
R-squared	0.285878	Mean dependent var		5.064545
Adjusted R-squared	0.212004	S.D. dependent var		2.915963
S.E. of regression	2.588475	Akaike info criterion		4.853228
Sum squared resid	194.3059	Schwarz criterion		5.034622
Log likelihood	-76.07826	F-statistic		3.869777
Durbin-Watson stat	1.433159	Prob(F-statistic)		0.019209

**Tabel 1.17**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:46  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.95972	7.253159	3.441221	0.0017
LYP	-2.280212	0.770062	-2.961074	0.0059
POV	0.023452	0.058353	0.401905	0.6906
R-squared	0.282335	Mean dependent var		5.064545
Adjusted R-squared	0.234490	S.D. dependent var		2.915963
S.E. of regression	2.551275	Akaike info criterion		4.797572
Sum squared resid	195.2701	Schwarz criterion		4.933618
Log likelihood	-76.15993	F-statistic		5.901109
Durbin-Watson stat	1.429048	Prob(F-statistic)		0.006900

**Tabel 1.18**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:47  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.49961	9.904627	1.968737	0.0586
LYP	-3.306213	0.868874	-3.805170	0.0007
LPAD	0.747300	0.525870	1.421073	0.1660
R-squared	0.334057	Mean dependent var		5.129688
Adjusted R-squared	0.288130	S.D. dependent var		2.938124
S.E. of regression	2.478965	Akaike info criterion		4.742619
Sum squared resid	178.2128	Schwarz criterion		4.880032
Log likelihood	-72.88191	F-statistic		7.273637
Durbin-Watson stat	1.757060	Prob(F-statistic)		0.002753

**Tabel 1.19**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:49  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.89000	50.31753	1.130620	0.2678
LYP	-3.004181	0.961710	-3.123791	0.0041
LIPM	-9.541253	12.58500	-0.758145	0.4547
LPAD	0.779358	0.531453	1.466466	0.1537
R-squared	0.347453	Mean dependent var		5.129688
Adjusted R-squared	0.277537	S.D. dependent var		2.938124
S.E. of regression	2.497342	Akaike info criterion		4.784799
Sum squared resid	174.6280	Schwarz criterion		4.968016
Log likelihood	-72.55679	F-statistic		4.969586
Durbin-Watson stat	1.719655	Prob(F-statistic)		0.006870

**Tabel 1.20**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:50  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.50771	11.15934	1.389662	0.1756
LYP	-3.145019	0.897587	-3.503862	0.0016
POV	0.046590	0.058556	0.795649	0.4329
LPAD	0.840493	0.542035	1.550624	0.1322
R-squared	0.348781	Mean dependent var		5.129688
Adjusted R-squared	0.279007	S.D. dependent var		2.938124
S.E. of regression	2.494799	Akaike info criterion		4.782762
Sum squared resid	174.2726	Schwarz criterion		4.965979
Log likelihood	-72.52419	F-statistic		4.998754
Durbin-Watson stat	1.615367	Prob(F-statistic)		0.006688

**Tabel 1.21**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:58  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.775814	12.18214	0.063685	0.9497
POV	0.092900	0.067228	1.381868	0.1776
LPAD	0.147044	0.594686	0.247262	0.8064
R-squared	0.063243	Mean dependent var		5.129688
Adjusted R-squared	-0.001361	S.D. dependent var		2.938124
S.E. of regression	2.940122	Akaike info criterion		5.083839
Sum squared resid	250.6852	Schwarz criterion		5.221252
Log likelihood	-78.34143	F-statistic		0.978935
Durbin-Watson stat	1.156635	Prob(F-statistic)		0.387784

**Tabel 1.22**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/01/11 Time: 23:59  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	96.47599	62.75133	1.537433	0.1347
LIPM	-21.51931	14.54646	-1.479351	0.1495
POV	0.027724	0.073384	0.377794	0.7082
R-squared	0.135640	Mean dependent var		5.064545
Adjusted R-squared	0.078016	S.D. dependent var		2.915963
S.E. of regression	2.799907	Akaike info criterion		4.983557
Sum squared resid	235.1843	Schwarz criterion		5.119603
Log likelihood	-79.22869	F-statistic		2.353889
Durbin-Watson stat	1.161674	Prob(F-statistic)		0.112310

**Tabel 1.23**

Dependent Variable: L  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/02/11 Time: 00:01  
 Sample: 1 33  
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.7338	53.80659	2.076582	0.0468
LIPM	-25.82644	13.07012	-1.975992	0.0577
LPAD	0.178656	0.565327	0.316023	0.7542
R-squared	0.120038	Mean dependent var		5.129688
Adjusted R-squared	0.059351	S.D. dependent var		2.938124
S.E. of regression	2.849600	Akaike info criterion		5.021294
Sum squared resid	235.4863	Schwarz criterion		5.158707
Log likelihood	-77.34070	F-statistic		1.977987
Durbin-Watson stat	1.274424	Prob(F-statistic)		0.156576

Lampiran 1 :

Tabel Data Olahan

No	Provinsi	Yp (Ribu Rp)	IPM (ipm)	Pov (%)	PAD (Juta Rp)	Jumlah AK UKM ( Ribu Rp)	AK (Juta Rp)	L <sub>ukm</sub> (%)
1	Naggroe Aceh Darussalam	7375,50	71,31	21,80	492248511	102391	1898000	5,40
2	Sumatera Utara	8420,60	73,8	11,51	968029297	159667	6298070	2,50
3	Sumatera Barat	7552,80	73,44	9,54	765669000	109976	2180966	5,04
4	Riau	17663,00	75,6	9,48	1017735596	25799	2260862	1,14
5	Jambi	5741,50	72,45	8,77	254778023	42080	1290854	3,26
6	Sumatera Selatan	8369,00	72,61	16,28	558667449	119406	3487999	3,42
7	Bengkulu	4608,60	72,55	18,59	147035950	20130	829000	2,42
8	Lampung	4826,60	70,93	20,22	287369751	178760	3740000	4,80
9	Bangka Belitung	8995,80	72,55	7,46	179946537	13017	556132	2,34
10	Kepulauan Riau	25290,60	74,54	8,27	604237366	21840	681769	3,20
11	DKI Jakarta	40268,80	77,36	3,62	-	139601	4690000	2,98
12	Jawa Barat	7292,00	71,64	11,96	2769454770	1004499	18890000	5,31
13	Jawa Tengah	5345,70	72,1	17,72	2316171546	1663882	16610167	10,01
14	DI Yogyakarta	5725,90	75,23	17,23	392301922	135391	2020000	6,70
15	Jawa Timur	8587,90	71,06	16,68	2954180027	1212882	20316770	5,97
16	Banten	7363,10	70,06	7,64	842955982	129251	4456720	2,90
17	Bali	7386,10	71,52	5,13	1114113667	177723	2123588	8,37
18	Nusa Tenggara Barat	4129,50	64,66	22,78	262629170	252115	1915234	13,16
19	Nusa Tenggara Timur	2578,30	66,6	23,31	306593585	143469	2340000	6,13
20	Kalimantan Barat	6714,70	68,79	9,30	256485857	72989	2200895	3,32
21	Kalimantan Tengah	8458,20	74,36	7,02	272208726	27879	1047402	2,70
22	Kalimantan Selatan	8271,70	69,3	5,12	412365066	99087	1821717	5,43
23	Kalimantan Timur	33333,50	75,11	7,73	874927658	31228	1460996	2,13
24	Sulawesi Utara	7465,20	75,68	9,79	180445972	58262	1077155	5,40
25	Sulawesi Tengah	6400,40	70,7	18,98	190064550	55762	1215727	4,60
26	Sulawesi Selatan	5982,70	70,94	12,31	821050438	171652	3536920	4,80
27	Sulawesi Tenggara	5083,60	69,52	18,93	274167567	106315	986096	10,80
28	Gorontalo	2754,90	69,79	25,01	136706657	40064	447313	8,90
29	Sulawesi Barat	3918,90	69,18	15,29	65570008	37140	515830	7,20
30	Maluku	2980,80	70,96	28,23	119025279	55897	589703	9,50
31	Maluku Utara	2882,30	68,63	10,36	220217964	12258	422400	2,90
32	Irian Jaya Barat	9098,70	68,58	35,71	125998765	5777	360660	1,60
33	Papua	10930,50	64,53	37,53	392982042	21071	76396	2,80
	<b>INDONESIA</b>	<b>9409,10</b>	<b>71,76</b>	<b>14,15</b>	<b>20576334698</b>	<b>6447260</b>	<b>3404404</b>	<b>189,40</b>